

KONTESTASI IDENTITAS ISLAM MODERAT DI ASIA TENGGARA

Lelly Andriasanti
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan
lelly15a@gmail.com

Abstrak

Di Asia Tenggara, ada dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Mereka adalah Indonesia dan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya menunjukkan identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negerinya. Pada dasarnya, Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan Islam, meskipun populasi Muslimnya merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan dunia. Sementara itu, Malaysia adalah negara yang identik dengan Islam. Dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari refleksi identitas moderat di kedua negara, makalah ini menggunakan metode kualitatif dalam kerangka studi banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang global melawan teror telah menyebabkan kontestasi identitas Islam moderat antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara Muslim terbesar di Asia Tenggara tersebut sebelumnya tidak pernah berlomba-lomba untuk menunjukkan identitas Islam moderat. Hasil lain dari penelitian ini adalah Indonesia dan Malaysia memiliki modal domestik dari karakter Islam moderat di mana aplikasi pencitraan di ranah kebijakan luar negeri dilakukan secara berbeda. Representasi dari identitas Islam moderat berkaitan dengan capaian kedua negara untuk lebih dekat dengan Barat dan dunia Islam.

Kata kunci: kompetisi, identitas, kebijakan luar negeri, Indonesia, Malaysia

Abstract

In Southeast Asia, there are two countries with a Muslim majority population. Those are Indonesia and Malaysia. In recent years, both of them show their moderate Islamic identity in their foreign policy. Basically, Indonesia is not a country that based on Islam, though their Muslim population is the largest in Southeast Asia and the world. Meanwhile, Malaysia is identically an Islamic state. In order to get better understanding of the reflection of moderate Islamic identity in both countries, this paper uses qualitative methods within the framework of a comparative study. The result of research show that global war on terror has led contestation moderate Islamic identity between Indonesia and Malaysia. Those two largest Muslim countries in Southeast Asia had not previously been vying to show moderate Islamic identity. The other result of this study is both Indonesia and Malaysia have domestic modal of moderate Islamic character where the imaging applications in the realm of foreign policy have done differently. Representation of moderate Islamic identity was associated with the achievements of both countries to get closer to the West and the Islamic world.

Keywords: competition, identity, foreign policy, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional, negara membutuhkan identitas untuk menunjukkan eksistensi dan pembeda dari negara lainnya. Selain membentuk kepentingan nasional, identitas juga menentukan nilai-nilai yang menjadi pedoman suatu negara dalam bertingkah laku di tataran internasional. Identitas pun menyediakan referensi dalam membangun suatu hubungan antar negara, apakah itu kawan ataupun lawan. Karena itu, identitas sering kali dituangkan dalam kebijakan luar negeri sebagai atribut yang melekat kuat pada citra negara.

Sebagai sistem nilai sosial dan kepercayaan, identitas agama kian menonjol baik dalam kehidupan domestik maupun internasional. Dalam hubungan internasional saat ini, signifikansi agama terletak pada pengaruh politiknya. Agama memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kehidupan ber-negara dan berhubungan antar negara (Nair, 1997). Islam khususnya, menjadi sorotan tajam dalam tiap diskursus kontemporer.

Setidaknya, Islam memiliki dua relevansi dengan hubungan internasional. *Pertama*, secara doktrinal banyak kalangan Muslim meyakini bahwa Islam bukan hanya agama universal yang benar dan final, tapi juga

dianggap sebagai fondasi bagi konsepsi akan suatu sistem internasional (Sheikh, 2003). Internasionalisasi konsep ini berhubungan dengan pandangan kalangan Muslim akan sistem dunia yang terbagi dalam dua bagian yaitu, *Dar-al-Islam* (daerah Islam) dan *Dar-al-Harb* (daerah perang). *Kedua*, secara fenomenologis relevansi Islam dengan hubungan internasional dapat dilihat menjelang berakhirnya Perang Dingin yang menganggap Islam sebagai bahaya laten seperti halnya komunisme. Klimaksnya terjadi ketika peristiwa serangan *World Trade Center* (WTC) yang membawa politik internasional dalam perang global terhadap teror.

Perang global terhadap teror yang diwarnai operasi militer di Afghanistan dan Irak ternyata berkembang menjadi perasaan anti Islam di dunia Barat. Hal ini ditandai dengan banyaknya persepsi masyarakat Barat yang menempatkan Islam sebagai musuh bersama (Shadid dan Koningsveld, 2002). Untuk menanggapi, dunia Muslim cenderung melakukan protes dan kecaman, tidak terkecuali komunitas Muslim di Asia Tenggara. Namun, reaksi protes komunitas Muslim di kawasan ini relatif terbatas. Hal ini terlihat dari respon dua negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Pada kasus Malaysia, pemerintah berupaya mengatur dan mengendalikan protes dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa perang di Irak tidak diarahkan terhadap Islam. Faktor lain yang membatasi dampak operasi militer di Irak dan Afghanistan terhadap kawasan adalah preferensi publik secara luas yang memprioritaskan isu domestik sehingga menutup isu internasional. Di Indonesia khususnya, perubahan iklim politik akibat peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 mengubah aksi massa oleh kelompok radikal menjadi kurang dapat diterima. Secara komprehensif, Angel M. Rabasa menyebut reaksi Muslim di kawasan ini relatif moderat (Rabasa, 2004).

Dalam perkembangannya, baik Indonesia maupun Malaysia nampak berlomba-lomba dalam mempromosikan kemoderatan Islam di tingkat regional maupun global. Bahkan keduanya seperti tengah melakukan kontestasi dalam merepresentasikan identitas Islam moderat. Gejala tersebut semakin terlihat dalam satu dekade terakhir melalui sejumlah forum, seperti *Bali Democracy Forum* (BDF) yang diinisiasi Indonesia dan *Global Movement of Moderates* (GMM) yang merupakan inisiasi Malaysia. Dari sinilah muncul pertanyaan, mengapa terjadi kontestasi

dalam merepresentasikan identitas Islam moderat antara Indonesia dan Malaysia?

Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri

Studi mengenai identitas dalam kebijakan luar negeri bukanlah hal baru. Tidak sedikit akademisi yang mengkaji studi ini. Identitas yang dituangkan dalam karya mereka pun beraneka ragam, mulai dari ideologi, nasional, etnis, institusional dan agama. Beberapa akademisi yang telah melakukan studi tentang identitas antara lain Elisabeth Johansson-Nogués dan Robert Jervis.

Studi pertama yang akan dibahas dalam tinjauan pustaka ini adalah "*Is the EU's Foreign Policy Identity an Obstacle? The European Union, the Northern Dimension and the Union for the Mediterranean*". Dalam studi ini, Elisabeth Johansson-Nogués mengungkap identitas dalam kerangka institusi yang mengatasnamakan kolektivitas negara-negara sebangsa. Kolektivitas yang terangkum dalam Uni Eropa (UE) ini menempatkan regional multilateralisme, kebijakan multi-sektoral, dan intervensionisme sebagai identitas.

EU pun mempromosikan kerangka kerja multilateral untuk menjalin hubungan dengan negara-negara terdekat, khususnya kawasan Mediterania dan Baltik. Akan tetapi,

kerjasama antara UE dengan kedua kawasan tersebut mengalami kegagalan karena identitas UE terasa abstrak dan tidak menyiapkan kekuatan berbasis aksi kolektif. Kegagalan itu juga berkaitan dengan asumsi Baltik dan Mediterania yang melihat UE cenderung utilitarian, intrusif, dan terlalu Eropa (Johansson-Nogués, 2009).

Dalam “*Identity and the Cold War*”, Robert Jervis mengkaji identitas dalam kerangka nasional dan ideologi selama Perang Dingin. Dari studi tersebut terlihat konflik merupakan proses interaksi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) sebagai upaya mempertahankan identitas. Jika identitas dibentuk oleh konflik, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya kebutuhan masing-masing pihak untuk membangun dan memelihara identitas. Hal ini berarti akan sangat sulit untuk merenggangkan sistem internasional.

Dari logika itulah Perang Dingin menjadi lebih buruk ketika identitas masing-masing pihak berada di bawah tekanan. Korelasi identitas kedua negara *super power* dengan konflik yang terjadi di negara-negara dunia ketiga bukanlah terletak pada upaya mempertahankan identitasnya di kawasan Asia-Afrika. Konflik yang merupakan bentuk *Proxy War* tersebut lebih merupakan unjuk

kekuatan identitas yang coba disebarakan oleh AS dan US (Jervis, 2010).

Dari beberapa studi di atas, identitas dalam kebijakan luar negeri dapat ditunjukkan untuk memperjuangkan eksistensi negara baik dalam skala regional maupun internasional. Dengan kata lain, identitas memperlihatkan bagaimana anarki terjadi dalam dinamika sistem internasional. Identitas merupakan pemahaman kolektif yang mengkonstitusikan struktur sehingga mengorganisasi tingkah laku negara untuk dapat menentukan antara kawan atau lawan (Wendt, 1992). Persepsi identitas yang membedakan lawan dan kawan atau diri dengan pihak lain menjadi referensi aktor dalam berinteraksi.

Hal lain yang perlu diperhatikan, identitas tidak selalu menunjukkan wajah konfliktual seperti studi yang dipaparkan sebelumnya. Pengkajian identitas dalam tulisan ini justru menampilkan wajah yang kompetitif. Tulisan ini menyoroti pencitraan identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia pasca serangan WTC 2001. Studi ini menjadi menarik karena kompetisi antara keduanya tidak lepas dari fenomena Islam dalam studi internasional yang sering kali mendapat stigma intoleran. Stigma demikian tentu tidak bisa

digeneralisir. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang Islam yang lebih toleran.

Sedangkan dalam memahami kompetisi identitas Islam moderat antara Indonesia-Malaysia, pengkajian tulisan dilakukan dalam kerangka studi perbandingan. Hal ini berguna untuk melihat persamaan dan perbedaan promosi identitas Islam yang diaplikasikan dalam kebijakan luar negeri masing-masing. Karen itu, studi identitas dalam tulisan ini sengaja dibatasi dalam lingkup kawasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan kontekstualisasi fenomena identitas dalam studi kebijakan luar negeri.

Atas dasar itulah, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode penelitian ini menekankan pada pendekatan humanistik untuk memahami realitas kehidupan sosial yang bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivis yang memandang, identitas merupakan definisi diri yang dapat dibentuk, diciptakan, dan berubah (Viotti dan Kaupi, 2007). Atas dasar definisi diri ini, identitas dipahami sebagai peran spesifik yang relatif stabil dan memuat harapan akan sesuatu yang diperoleh melalui interaksi dalam susunan struktur

hubungan sosial (Viotti dan Kaupi, 2010).

Akan tetapi, identitas juga dapat berubah bergantung konteks yang berlaku. Kontekstualisasi identitas, aturan, dan norma datang bersamaan dengan konsep logika kelaikan dalam konstruktivis. Logika kelaikan berasumsi bahwa aktor selalu mengikuti norma dan aturan yang diasosiasikan dengan identitas tertentu pada situasi tertentu pula. Dari beberapa metode penelitian, karya ilmiah ini akan menggunakan studi perbandingan (*comparative study*).

Metode studi perbandingan sengaja dipilih agar penyusunan penelitian ini dilakukan dengan generalisasi yang bersifat lintas batas dan tidak hanya fokus pada sosiokultural masyarakat tertentu. Studi ini juga lebih menekankan observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada satu teritorial tertentu. Karena itu, metode ini menggunakan beberapa kasus yang memiliki klasifikasi serupa dalam suatu permasalahan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan variabel-variabel dan varian yang ada dalam kasus-kasus tersebut untuk diuraikan persamaan dan perbedaannya.

Presentasi Islam Moderat sebagai Respon atas Jaringan Teroris di Kawasan

Bagi kawasan Asia Tenggara, perang global terhadap terorisme justru lebih membawa pengaruh besar, dibandingkan operasi militer di Irak ataupun Afghanistan. Dari sudut pandang kawasan, perubahan isu keamanan regional bukan disebabkan serangan 11 September. Akan tetapi, hal ini lebih dikarenakan kepemimpinan AS dalam perang melawan terorisme yang kemudian direspon pemerintah, aktor-aktor politik dan agama di kawasan sebagai urgensi. Akibat dari persepsi tersebut, perang global terhadap terorisme membawa dua konsekuensi umum di Asia Tenggara (Rabasa, 2004).

Pertama, fokus perhatian dialamatkan pada hubungan antara Al-Qaeda dan kelompok-kelompok radikal lokal. Hal ini mendorong terciptanya peluang kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Barat dan negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa peluang kerjasama itu antara lain, adanya kerangka kerja untuk meningkatkan bantuan militer; penyebaran informasi intelijen antara negara-negara di kawasan; dan perluasan akses militer untuk mendukung kerjasama kontraterorisme.

Kedua, Asia Tenggara diperhitungkan sebagai daerah transit bagi jaringan terorisme sehingga berpotensi sebagai medan perang melawan terorisme. Penempatan Asia Tenggara sebagai *front* kedua dalam perang melawan terorisme dikemukakan AS saat melancarkan operasi militer di Afghanistan. Istilah *front* kedua mencerminkan tingginya tingkat ancaman teroris di Asia Tenggara. Ancaman yang dimaksud bersumber dari faksi Islam radikal dan milisi bersenjata, serta kemudahan akses bagi operasi kelompok teroris di daerah perbatasan yang kurang mendapat pengawasan dari pemerintah setempat.

Isu utama AS dalam perang global terhadap terorisme bukan hanya memberantas kelompok teroris semata. Hal ini lebih pada bagaimana menyesuaikan antara pemberantasan gerakan Islam militan, penguatan pemerintahan yang bersehabat dan kelompok moderat di dunia Islam. Bagi Barat, Muslim moderat merupakan aliansi potensial yang paling efektif karena merangkul tradisi yang berbasis pada nilai-nilai masyarakat modern seperti demokrasi dan pluralisme (Rabasa, 2007). Menurut Benazir Bhutto, jika demokrasi menjadikan kediktatoran sebagai musuh bebuyutan, maka lawan dari moderasi adalah

ekstremisme. Karena itu, jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat yang plural, yaitu rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan toleransi untuk menggempur kediktatoran dan ekstremisme (Bhutto, 2008).

Dalam melawan terorisme, strategi yang digunakan Barat tidak lepas dari promosi demokrasi seperti pengalamannya selama Perang Dingin. Demokrasi yang dimaksudkan tentunya sesuai dengan pemahaman tradisi liberal Barat, yaitu kesepakatan atas legitimasi politik yang berasal dari kehendak rakyat yang diungkapkan melalui pemilu demokratis. Komitmen terhadap demokrasi ini merupakan isu kunci dalam mengidentifikasi Muslim moderat. Rabasa kemudian merinci Muslim moderat dalam beberapa karakteristik, yakni penerimaan akan sumber hukum yang non-sektarian; penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas; berposisi terhadap terorisme dan aksi-aksi kekerasan yang tidak dapat dibenarkan.

Di sisi lain, Barat menyadari bahwa jaringan Islam moderat kurang memiliki sumber daya finansial dan organisasional dalam membangun jaringan mereka sendiri. Kondisi ini bertolak belakang dengan kelompok Islam radikal yang terbilang sedikit tapi

memiliki sumber pendanaan kuat dan jaringan yang luas. Kelompok radikal kebanyakan memperoleh dana dari Saudi selama tiga dekade terakhir.

Dana tersebut merupakan kepanjangan dari ekspor Wahabisme Islam versi Saudi yang berdampak pada pertumbuhan ekstremisme agama di seluruh dunia Muslim. Yayasan Saudi Al-Haramain salah satunya, telah ditutup karena terbukti mendanai sejumlah organisasi teroris dari Bosnia ke Asia Tenggara. Selain itu, kelompok radikal telah mengembangkan jaringan selama bertahun-tahun hingga mencapai skala transnasional (Sheikh, 2003). Dari sinilah terlihat perhatian Barat di Asia Tenggara terletak pada upaya membangun jaringan Islam moderat untuk menangkal jaringan terorisme.

Indonesia: Kemoderatan Islam di Negeri Muslim yang Nontokrasi

Terkait upaya pembangunan jaringan Islam moderat oleh Barat, Indonesia nampaknya menanggapi ekspektasi tersebut secara positif. Dalam paparan tahunan Departemen Luar Negeri (Deplu) pada Januari 2004, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengungkapkan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memikul kewajiban untuk memproyeksikan wajah

Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang moderat.

Melalui pencitraan Islam moderat inilah Indonesia sepertinya mencoba untuk membedakan diri dari kesan radikal yang dilabelkan pada Islam pasca serangan WTC 2001. Pencitraan ini juga merupakan upaya Indonesia untuk mengklarifikasi kesalahpahaman pandangan Barat yang mengklaim bahwa kegagalan konsolidasi demokrasi cenderung terjadi pada negara-negara berpenduduk Muslim (Lewis, 1958; Kedourie, 1992; Huntington, 1993).

Meski berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia bukanlah negara berlandaskan sistem Islam. Bahkan, tumbuh pesatnya partai politik yang berlandaskan Islam pasca kemerdekaan dan pasca reformasi tidak menunjukkan indikasi pembentukan Indonesia sebagai negara Islam (Anwar, 2010). Implikasinya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berkarakter Islam atau non-Islam. Menurut Rizal Sukma, alasan pemerintah untuk terus menghindari ekspresi formal faktor Islam dalam kebijakan luar negeri dikarenakan sifat identitas negara yang mempertahankan identitas nonteokrasi sehingga menolak faktor keagamaan eksklusif (Sukma, 2003).

Dengan demikian, kemoderatan Islam hanyalah komplemen dari identitas

formal Indonesia. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah I (RPJMN I) 2005-2009, salah satu sasarannya difokuskan untuk memperkuat dan memperluas identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Hal ini ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam *Indonesian Council on World Affairs (ICWA)* pada 19 Mei 2005. Ia menyatakan, “*We are fourth most populous nation in the world. We are home to the world's largest Muslim population. We are the world's third largest democracy. We are also a country where democracy, Islam and modernity go hand in hand.*”

Tendensi demokrasi dan Islam moderat sepertinya merupakan upaya Indonesia dalam mendekati diri dengan negara demokrasi maju, khususnya Barat. Dalam studinya mengenai bagaimana negara-negara demokrasi baru menggunakan kebijakan luar negerinya, Alison Stanger menemukan bahwa proses demokrasi bisa dipertahankan arahnya ketika negara-negara demokrasi baru membawa dirinya lebih dekat kepada negara-negara demokrasi yang lebih mapan (Stanger, 1955).

Untuk menjelaskan fenomena ini, Philips J. Vermonte mengemukakan dua alasan. *Pertama*, kebijakan luar negeri

bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga jarak atau membedakan diri dari rezim otoritarian yang digantikan. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari alasan yang pertama, prospek bagi kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara yang mapan demokrasinya akan semakin baik dan pada akhirnya memberi kontribusi positif bagi proses konsolidasi internal (Vermonte, 2005).

Perlu diingat, perekonomian Indonesia menerima banyak tekanan pasca rangkaian peristiwa bom teror di tanah air sejak Oktober 2002. Ekspor Indonesia mengalami penurunan sekaligus peningkatan *credit risk* yang tidak menyisakan sedikit pun kemungkinan bagi munculnya investasi, baik dari pihak asing maupun domestik (Sjahrir, 2004). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *travel warning* yang dikeluarkan sejumlah kedutaan besar seperti AS, Australia, dan beberapa negara Eropa Barat bagi warganya yang hendak berpergian ke Indonesia. Secara psikologis, isu teror bom telah mengurangi minat para wisatawan asing datang ke Indonesia. Akibatnya, pariwisata menjadi sektor yang mendapat imbas cukup besar dari isu teror bom.

Besarnya kerugian ekonomi dan politis yang dirasakan menjadi salah satu alasan Indonesia untuk berusaha

menghilangkan gambaran teror bom yang dimotori oleh gerakan-gerakan Islam radikal. Usaha ini dilakukan Indonesia dengan memberikan pencitraan Islam moderat, khususnya pada negara-negara Barat. Untuk menjalin kerjasama berkesinambungan dengan dunia Barat, Indonesia mengupayakan proses dialogis yang ditempuh melalui jalur diplomasi. Direktur Informasi dan Media Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, P.L.E. Priatna mengungkapkan, Islam moderat hanyalah bagian dari pencitraan dalam mempromosikan demokrasi yang digerakan melalui diplomasi.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa kebijakan luar negeri memiliki pengertian yang berbeda dengan diplomasi. Jika kebijakan luar negeri mempunyai perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, diplomasi lebih dipusatkan pada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri (Suryokusumo, 2004). Jalur diplomasi yang dimanfaatkan Indonesias dalam mencitrakan Islam moderat umumnya berupa dialog intensif seperti dialog antarkepercayaan (*interfaith*), antarbudaya (*intercultural*), dan antarperadaban (*intercivilization*). Hal ini dimaksudkan untuk membangun saling

pengertian dan pemahaman antaragama dan kepercayaan, budaya, dan peradaban yang berbeda.

Eksplorasi dari proses ini berlangsung secara bilateral, regional, maupun multilateral. Proses dialogis yang terwujud melalui hubungan bilateral dapat dilihat dari diselenggarakannya konferensi *Unity in Diversity: The Culture of Coexistence in Indonesia* antara Indonesia dan Italia. Sepanjang tahun 2008, Indonesia telah melakukan *interfaith dialogue* dengan Inggris, Austria, Selandia Baru, Belanda, Kanada, Lebanon, dan Australia. Sedangkan dalam kerangka regional dan multilateral, dialog-dialog serupa dapat ditemukan dalam ASEM sejak tahun 2005. Khusus kawasan Asia Pasifik, Konferensi Asia Pasifik tentang kerjasama dan dialog antar beragama juga telah dimulai pada 2004 dengan mengambil tempat di Yogyakarta.

Inisiatif lain yang diambil Indonesia dalam merepresentasikan demokrasi dan Islam moderat adalah dengan menyelenggarakan BDF. Forum yang berlangsung pada tataran inter-pemerintah ini menempatkan Indonesia sebagai pelopor dari forum yang secara khusus membahas demokrasi di kawasan Asia. Sejak diselenggarakan kali pertama pada 2008, antusiasme negara-negara di dunia yang berpartisipasi pada acara

BDF memperlihatkan pola yang meningkat, dari 40 peserta menjadi 82 peserta pada 2012.

Antusiasme tersebut pada gilirannya melahirkan interaksi yang lebih intensif antara Indonesia dengan negara-negara yang menghadiri acara tersebut. negara-negara demokrasi Barat umumnya memberikan pengakuan atas kredibilitas Islam Indonesia yang mampu berdampingan dengan demokrasi. Mereka juga mengharapkan Indonesia dapat memainkan peran sebagai suara Islam dunia untuk memediasi antara dunia Barat dan Islam.

Selain itu, Islam moderat Indonesia juga diharapkan dapat menjadi model alternatif yang mungkin diterapkan bagi masyarakat Muslim lainnya, seperti kawasan Timur Tengah (Anwar, 2010). Sejumlah harapan dunia internasional ini dibaca Indonesia sebagai peluang untuk mengambil peranan yang lebih besar sehingga Indonesia memiliki alasan yang lebih kuat dalam mencitrakan kemoderatan Islam yang ada pada dirinya.

Cara pandang Indonesia dalam melihat dunia juga memiliki proporsi yang krusial dalam membangun pencitraan tersebut. Cara pandang nasional terhadap dunia (*worldview*) merupakan persepsi dominan dari watak sistem dunia, sekaligus mengambil

tempat dalam sistem itu sendiri. Menurut Paige Johnson Tan, meskipun mengalami perubahan kepemimpinan yang drastis, konsistensi cara pandang Indonesia melihat sistem global tampak dari sejarah kontemporer negaranya (Tan, 2007).

Mulai dari awal kemerdekaan Indonesia hingga kini, cara pandang tersebut selalu dipenuhi oleh keinginan agar negaranya memiliki peranan di dunia internasional. Cara pandang ini termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Salah satu sasarannya adalah terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional. Terkait harapan agar Indonesia menjadi preseden alternatif Islam bagi kawasan Timur Tengah, komunitas Muslim dalam negeri sepertinya menanggapi hal ini sebagai peluang untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan dunia Islam.

Komunitas Muslim memandang, isu utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungannya dengan Islam bukanlah bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri secara Islami. Akan tetapi, lebih pada kebutuhan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Muslim

dan menaruh perhatian terhadap isu-isu di dunia Islam sekaligus melakukan inisiatif berarti terhadap isu tersebut. Mereka umumnya berpandangan, adalah absurd jika Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar hanya menduduki posisi pinggiran dan memainkan peran marginal di dunia Islam (Sukma, 2010).

Seiring dengan ekspektasi akan keharmonisan hubungan Indonesia dan Timur Tengah, bermunculan pula harapan agar hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Harapan ini disandarkan pada kenyataan bahwa meski perdagangan kedua kawasan tidak mengindikasikan penurunan, hubungan ekonomi keduanya belum mencapai tahap yang diharapkan. Nilai dagang Indonesia-Timur Tengah masih jauh di bawah nilai perdagangan Indonesia-AS atau Indonesia-Eropa. Padahal, Timur Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 11 persen per tahun (Thaib, 2011).

Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, investasi Timur Tengah ternyata relatif minim. Dibandingkan dengan investasi Jepang dan Korea Selatan, Indonesia masih belum menjadi salah satu tempat tujuan investasi utama negara-negara Timur Tengah. Perlu diketahui, potensi investasi dari Timur Tengah dianggap

sangat signifikan, khususnya dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang masuk menjadi bagian dari tiga besar negara dengan nilai PDB tertinggi di dunia versi *World Bank*.

Malaysia: Kemoderatan Identitas Melalui Islamisasi

Berbeda dengan Indonesia yang berprinsip nontokrasi, Islam di Malaysia sendiri telah menjadi lebih homogen. Konsolidasi Islam di Malaysia mencerminkan peran religio politik para sultan dan pemerintah dalam mendefinisikan agama. Pembangunan otoritas keagamaan untuk melihat masalah keagamaan di Malaysia telah dimulai sejak zaman kolonial Inggris. Meski tersisih dari hukum administrasi kolonial, hukum shari'a dan adat telah dikodifikasi dan relatif terbagun.

Melalui program Islamisasi, Malaysia terbilang lebih dini dalam merepresentasikan identitas Islam moderat dibandingkan dengan Indonesia. Islamisasi Malaysia secara formal dimulai pada masa pemerintahan Mahathir Mohammad. Gambaran akan identitas Islam Malaysia kali pertama disampaikan Mahathir dalam pidato kemenangannya pada Pemilu 1982. Ia mengartikulasikan keyakinannya bahwa Islam adalah agama pragmatis dan fleksibel yang merupakan dasar dari

setiap tindakan. Proyeksinya tidak lepas dari tendensi bahwa agama seharusnya dapat menjadi faktor penguat stabilitas untuk menjamin status Malaysia sebagai bangsa yang kuat, disiplin, dan arif. Penekanan identitas ini juga menegaskan bahwa Malaysia sebagai negara Islam dari Dunia Islam.

Secara internal, Islamisasi difokuskan untuk membedakan antara Islam moderat dengan radikal. Konflik yang terjadi antara kelompok moderat dan radikal di Malaysia berdampak pada persaingan politik internal yang menggulirkan perdebatan akan peran Islam di tengah masyarakat. Namun kemudian, pemerintah Mahathir menilai Islam moderat lebih tepat digunakan dalam menggambarkan konteks sosial Malaysia (Nair,1997).

Sedangkan secara eksternal, Islamisasi diinterpretasikan dengan sistem nilai yang memiliki relasi positif dengan dunia Barat. Artikulasi Islam sebagai faktor positif terkait dengan kekhawatiran pemerintah Malaysia akan generalisasi Islam dalam konotasi negatif di tengah hubungan internasional kontemporer. Karena itu, salah satu tujuannya adalah membuka diri pada dunia Barat, khususnya dalam investasi dan pembelajaran teknologi (Nair,1997).

Preferensi Mahathir dalam mencitrakan Islam moderat nampaknya

juga berhubungan dengan ketidaksukaan negara-negara Barat terhadap dirinya. Pemimpin Malaysia ini memang terkanal anti-Barat dan tidak disukai negara-negara Barat karena sikapnya yang terkadang keras dan kasar, serta kebijakannya yang tidak mengenal kompromi (Fitriani, 2012). Di bawah kepemimpinan Mahathir, Malaysia mengambil jarak dengan negara-negara Barat setelah lama mengandalkan bantuan Inggris dan AS. Namun, sikap ini tidak dimaksudkan untuk berkonfrontasi dengan Barat.

Hubungan Malaysia yang menjaga jarak dengan dunia Barat lebih dilatari oleh visi Mahathir untuk menjadikan Malaysia yang maju sepenuhnya tahun 2020. Dalam membangun perekonomian Malaysia, Mahathir mengharapkan gambaran Islam yang berorientasi progresif dapat sejalan dengan percepatan dan adanya ide-ide akan kepemimpinan dalam pembangunan. Akhirnya, eksistensi Malaysia dapat diakui baik oleh dunia Barat maupun Islam. Dalam hal ini, keterlibatan Malaysia dalam isu-isu berdimensi Islam dapat dilihat secara multilateral maupun bilateral.

Pada tingkat multilateral, sikap Malaysia di PBB tidak dapat dipisahkan dari posisinya dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Komitmen

pemerintah Mahathir sebagai anggota aktif OKI ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam isu-isu politik, ekonomi, dan teknis yang berdampak pada komunitas Muslim dunia. Sikap aktif Malaysia yang paling banyak mendapat sorotan adalah komitmennya terhadap *International Islamic Peace Committee* (IPC) yang ditujukan untuk menyelesaikan perang Iran-Irak pada awal 1980-an.

Dari komitmen tersebut Malaysia berusaha menghapuskan kecurigaan pihak asing atas segala gerakan Islam di dalam negeri. Kesan yang muncul kemudian lebih pada netralitas Malaysia yang berkeinginan mengeluarkan sentimen-sentimen keagamaan dalam konflik. Hal ini direfleksikan Malaysia dengan konsistensinya untuk bersikap abstein dalam *voting* majelis umum PBB yang membahas tentang resolusi perang Iran-Irak.

Sebagai negara Islam yang secara geografis jauh dari Timur Tengah, Malaysia cukup vokal menyampaikan pendapatnya dalam OKI. Salah satu perhatian besar Malaysia adalah potensi rivalitas antara negara-negara Arab di kawasan yang akan berimbas pada negara-negara Muslim yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Melalui KTT OKI 1987, Malaysia khawatir jika

rivalitas itu akan melukai solidaritas Muslim dunia.

Tidak hanya itu, Malaysia juga berani memberikan kritik atas tidak efesiennya kerja organisasi tersebut. Untuk itu, Malaysia menyerukan untuk segera dilakukannya reorganisasi dan restrukturisasi OKI agar lebih efektif. Seruan ini kembali disuarakan pada tahun 1993. Kali ini, Malaysia mengajukan formasi *Eminent Person Group* untuk melihat relevansi OKI dengan konteks global pasca Perang Dingin. Hal ini diharapkan berguna agar organisasi Islam tersebut menjadi lebih kohesif dan efektif sehingga memberikan manfaat bagi negara-negara Islam di seluruh dunia.

Pada tingkat bilateral, Malaysia lebih banyak menjalin relasi dengan negara-negara di kawasan Teluk dan Asia Barat. Preferensi geografis ini cukup memperlihatkan ambisi Malaysia yang lebih besar dibandingkan dengan upayanya dalam OKI. Melalui kedekatan relasi dengan negara-negara yang budayanya merujuk pada Timur Tengah, Malaysia hendak mencari afirmasi atas kredensi ke-Islam-annya. Hal ini berguna untuk memperkuat identitasnya sebagai negara Islam di dunia Muslim.

Hubungan bilateral ternyata lebih banyak membawa manfaat bagi Malaysia. Selain keuntungan immaterial

yang sifatnya politis, Malaysia juga mendapat keuntungan material. Setelah menerima pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya di dunia Muslim, Malaysia memperoleh tawaran kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari Bahrain dan Saudi Arabia. Sebagai bentuk rasionalisasi kerjasama, negara-negara teluk ini memberikan bantuan dana bagi pembangunan bank-bank Islami dan universitas Islam di Malaysia (Nair, 1997).

Negara-negara dengan tradisi Islam lainnya yang memiliki kedekatan hubungan dengan Malaysia antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Oman, Jordania, Mesir, dan Turki. Perlu diketahui juga, kedekatan Malaysia dengan negara-negara tersebut tidaklah lepas dari afinitas Islam. Namun, kondisi demikian tidak berlaku dalam pola kerjasama antara Malaysia-Pakistan. Hubungan personal antara pemimpin kedua negara – Mahathir dan Zia al-Haq – merupakan faktor kuat yang melatari hubungan signifikan antara Malaysia-Pakistan.

Sedangkan dengan negara-negara Dunia Barat, relasi Malaysia relatif terbangun dengan baik. Rekam jejak sejarah Malaysia yang merupakan bekas negara persemakmuran Inggris menandai keharmonisan hubungan ini. Bahkan,

kemerdekaan Malaysia diperoleh tanpa melalui jalur konfrontasi dengan negara induk kolonialnya. Relasi harmonis Malaysia dengan negara Barat lainnya dapat dilihat juga dari hubungan yang terjalin dengan AS sejak 1677. Hubungan ekonomi Malaysia-AS kian menguat setelah kemerdekaan Malaysia yang diawali dengan investasi dan diversifikasi dana elektronik dan produksi minyak kelapa sawit. Bahkan, AS berpihak pada Malaysia ketika Indonesia melancarkan konfrontasi di tahun 1963.

Terkait pembangunan jaringan Islam moderat, Malaysia di bawah kepemimpinan Tun Abdul Razak menyerukan kepada seluruh negara-negara dunia untuk berpartisipasi dalam GMM. Tujuan dari GMM adalah mengajak seluruh negara-negara untuk mengancam dan menolak ekstrimis. Konferensi internasional GMM secara resmi diadakan di Kuala Lumpur pada Januari 2012 (memiliki selisih waktu empat tahun dengan BDF). Kelanjutan dari konferensi ini adalah pendirian GMM Foundation sebagai pusat pertama dalam penyebaran informasi tentang konsep moderasi dalam memerangi momok ekstremisme. Untuk itu, GMM menaruh perhatian besar di lima area studi, yaitu koeksistensi perdamaian,

demokrasi, hukum, finansial, pendidikan, dan resolusi konflik.

Tantangan Representasi Identitas Islam Moderat

Uraian sebelumnya memperlihatkan Indonesia dan Malaysia sama-sama mencoba merepresentasikan identitas Islam moderat sehingga mengesankan adanya kontestasi antara keduanya. Akan tetapi, aplikasi representasi Islam moderat yang dilakukan keduanya ternyata menunjukkan pola berbeda. Jika Indonesia memilih untuk meng-aplikasikannya melalui jalur diplomasi, kebijakan luar negeri Malaysia melekat erat dengan Islam moderat. Meski berbeda cara representasi, tantangan yang dihadapi antara Indonesia dan Malaysia tidak sepenuhnya berbeda. Perbedaan tantangan di kedua negara tersebut lebih terletak pada ranah domestik.

Tantangan Indonesia sendiri dalam mencitrakan Islam moderat cukup kompleks. Kondisi sosiokultural Indonesia yang heterogen merupakan faktor utama yang memicu aksi-aksi intoleransi di dalam negeri. Intoleransi yang terjadi di Indonesia umumnya dialamatkan pada kelompok minoritas. Kelompok-kelompok minoritas yang menjadi korban intoleransi memang

dapat berasal dari etnis, suku, bangsa, dan ras. Namun terkait kajian dalam tulisan ini, kasus-kasus intoleransi yang dimaksud berkorelasi dengan agama sehingga korbannya antara lain kelompok non-Muslim dan aliran Islam minoritas.

Sedikitnya, terdapat empat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencitrakan Islam moderat. *Pertama*, peningkatan dan penyebaran gerakan kelompok Islam radikal yang cenderung melakukan aksi-aksi anarkis, khususnya pada komunitas Muslim dan aliran Islam minoritas yang dinilai sesat. *Kedua*, regenerasi terorisme yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu tujuannya adalah penyerangan terhadap simbol-simbol Barat dan pihak-pihak yang dianggap membela kepentingan asing, termasuk pemerintah.

Ketiga, penerapan hukum syariah di tingkat daerah yang melukai pluralitas agama di Indonesia karena meniadakan keberadaan agama-agama selain Islam. Tidak jarang, perda syariah melanggar HAM dan mendiskreditkan perempuan. *Keempat*, pengaruh MUI melalui fatwa-fatwanya yang seringkali dijadikan bahan legitimasi bagi kelompok-kelompok Islam radikal untuk melakukan kekerasan.

Jumlah kelompok Islam radikal di Indonesia memang relatif kecil, tetapi

aksi kekerasan ternyata mendapat peliputan media dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sepertinya, intensitas publikasi aksi-aksi intoleransi oleh media massa berpengaruh dalam mengambil perhatian publik nasional dan internasional. Akibat lebih jauh, peliputan media terhadap aksi-aksi intoleransi dapat mereduksi pencitraan Islam moderat pada skala internasional. Bahkan, beberapa NGO menganggap pemerintah sebagai salah satu faktor penyebab maraknya aksi-aksi intoleransi tanah air karena tidak serius dalam menangani aksi-aksi intoleransi. Sikap pemerintah ini terlihat tidak konsisten dengan gambaran Islam moderat, sehingga pencitraannya dalam kebijakan luar negeri seperti dipaksakan.

Berbeda dengan Indonesia, beragama di Malaysia erat kaitannya dengan identitas politis dari kelompok etnis dominan, Melayu. Dengan kata lain, Malaysia lebih menekankan pembangunan kerangka ideologis yang mempromosikan identitas tertentu berdasarkan etnis. Menurut Andrew Humphries, agenda Islamisasi Malaysia lebih menargetkan masyarakat Melayu sebagai upaya untuk mempromosikan visi Islam dalam melayani kepentingan rezim berkuasa (Humphries, 2010).

Dalam mempromosikan kepentingan pemerintah, Malaysia melakukan

pendekatan keamanan dengan menggabungkan penggunaan aparatur koersif dengan mekanisme ideologis. Aparatur koersif yang terdiri dari sejumlah undang-undang represif ditegakkan oleh polisi. Sedangkan mekanisme ideologis berfungsi untuk membatasi ruang bagi ide-ide yang mengancam legitimasi rezim. Fungsi lain dari ideologis adalah menjamin keamanan rezim dengan melegitimasi berbagai hal yang diaplikasikan aparat koersif maupun rezim.

Mengingat bentuk Islam di Malaysia bergantung pada rezim yang berkuasa, maka karakter Islam Malaysia berpotensi untuk menjadi fundamentalis dan otoriter. Praktik fundamentalisme Islam oleh rezim yang berkuasa tidak hanya dimotivasi partai oposisi fundamentalis seperti Partai Islam Se-Malaysia (PAS), tetapi juga penafsiran konsep yang cenderung fundamentalis oleh pemimpin rezim. Pada masa pemerintahan Abudullah Ahmad Badawi contohnya, Malaysia berkomitmen untuk menerapkan Islam Hadhari yang ternyata mengilhami pembacaan yang kaku terhadap teks-teks Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip ideal Islam Hadhari seperti yang termuat di bawah ini.

Islam Hadhari merupakan terdiri dari beberapa prinsip. *Pertama,*

iman dan takwa kepada Allah. Prinsip ini tampaknya meremehkan agama-agama di luar Islam, tetapi klarifikasi dilakukan pada prinsip berikutnya. *Kedua,* penekanan keyakinan dalam kebebasan beragama. *Ketiga,* tidak adanya paksaan dalam beragama. *Keempat,* penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kelima,* pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif yang menggambarkan fondasi ekonomi dari Islam Hadhari. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang integratif melalui produksi sumber daya manusia. *Kelima,* penggabungan praktik moral ekonomi dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Singkatnya, prinsip-prinsip ini berusaha untuk dimasukkan dalam pengertian praktik Abdullah bahwa Islam adalah agama untuk pengembangan. *Keenam,* integritas moral dan kultural yang terdiri dari internalisasi nilai-nilai moral yang menjamin kemakmuran, keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat multirasial. Dengan kata lain, perkembangan moral dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam Hadhari lainnya adalah terselenggaranya pemerintahan yang adil dan dapat dipercaya; masyarakat yang merdeka dan mandiri; kualitas hidup bermasyarakat; perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan perempuan; menjaga lingkungan hidup dan memperkuat pertahanan (Humphryes, 2010).

Dengan memberikan dukungan ideologis kepada aparat koersif, Islam Hadhari pun digunakan untuk membenarkan serangan pemerintah terhadap sekte yang dianggap sesat. Salah satunya adalah tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol yang kemudian ditangkap di Selangor pasca kemenangan Barisan Negara (BN) pada 2004. Penangkapan tersebut telah memotivasi Menteri Besar khir Toyo untuk menindaklanjuti 60 sekte menyimpang lainnya yang beroperasi di Selangor. Hal ini sesuai dengan kepercayaan BN bahwa mereka telah mendapatkan mandat dari pemilu untuk terus menggunakan aparat koersif pemerintah.

Tindakan keras pemerintah lainnya ditujukan pada sekte Kerajaan Langit pada tahun 2005. Sekte agama di Terengganu ini ditutup dengan alasan memiliki dokumen yang bertentangan dengan Islam sehingga akan membahayakan agama maupun stabilitas politik. Sejak diperkenalkan konsep Islam tersebut, Abdullah pun mengklaim bahwa beberapa elemen di Malaysia sebenarnya telah menjadi lebih konservatif dan radikal.

Kesimpulan

Kendati Indonesia dan Malaysia memiliki modal domestik berkarakter

Islam moderat, representasi identitas tersebut diaplikasikan secara berbeda. Indonesia lebih memilih untuk merepresentasikan Islam moderat melalui jalur diplomasi dan bukan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri lantaran faktor nontokrasi. Sedangkan identitas Islam moderat Malaysia telah menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimanapun cara merepresentasikan identitas tersebut, tujuan akhirnya tidak lepas dari keinginan kedua negara untuk mendekatkan diri dengan dunia Barat dan Islam.

Berdasarkan uraian sebelumnya, alasan terjadinya kontestasi identitas Islam moderat antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara dapat ditarik menjadi tiga argumen utama.

Pertama, adanya stigma berkelanjutan tentang Muslim yang intoleran, ekstrimis, dan anti-Barat mendorong Indonesia dan Malaysia mengidentifikasi diri sebagai Islam moderat. Stigma tersebut telah muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin yang kemudian memperoleh masifikasi media pasca peristiwa serangan WTC pada 11 September 2001.

Kedua, adanya wacana perang global terhadap teror yang menstimulasi negara-negara Barat untuk membangun

jaringan Islam moderat di Asia Tenggara. Mengingat Asia Tenggara dijadikan *front* kedua melawan terorisme, pembangunan jaringan ini diharapkan mampu mengantisipasi gerakan-gerakan Islam radikal di kawasan. Hal ini kemudian direspon Indonesia dan Malaysia untuk mereduksi perkembangan gerakan Islam radikal di dalam negeri. Respon Islam moderat yang dimunculkan Indonesia-Malaysia justru menimbulkan kontestasi di tataran internasional, karena kedua negara sama-sama berkeinginan menjadi model Islam alternatif bagi dunia Islam.

Ketiga, adanya keinginan Indonesia dan Malaysia untuk menjaga hubungan yang lebih erat dengan negara-negara dunia Barat dan Islam. Keinginan ini tidaklah lepas dari motif keuntungan ekonomis untuk pembangunan domestik masing-masing negara.

Daftar Pustaka

Buku

Bhutto, Benazir. *Reconciliation: Islam, Democracy, and the West*. London: Simon and Schuster, 2008.

Fitriani, Evi. “Evolusi Hubungan Indonesia-Malaysia”, dalam *Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Sosial, Budaya, Negara, dan Media: Kasus*

Perbatasan dan Pekerja Migran. Jakarta: UI Press, 2012.

Jervis, Robert. “Identity and the Cold War”, dalam Melvyn P. Leffler dan Odd Arne Wested (ed.). *The Cold War Vol. II: Crises and Détente*. London: Cambridge University Press, 2010.

Kedourie, Ellie. *Democracy and Arab Political Culture*. Washington DC: Washington Institute for Near East Studies, 1992.

Nair, Shanti. *Islam in Malaysian Foreign Policy*. London: Routledge, 1997.

Rabasa, Angel M. et al. *Building Moderate Network*. Santa Monica: RAND Corporation, 2007.

Rabasa, Angel M. et al. *The Muslim World after 9/11*. Santa Monica: RAND Corporation, 2004.

Shadid, W. dan P.S. van Koningsveld. *Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the European Union*. Lauven: Peeters. 2002.

Sheikh, Naved S. *The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States*. London: RoutledgeCurzon, 2003.

Sjahrir. *Transisi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Stanger, Alison. "Democratization and the International System: The Foreign Policies of Interim Governments", dalam Yossi dan Juan Linz (ed.). *Between States: Interim Governments and Democratic Transitions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1955.
- Sukma, Rizal. *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London: RoutledgeCurzon, 2003.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Vermonte, Philips J. "Demokratisasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Membangun Citra Diri", dalam Bantarto Bandoro (ed.). *Mencari Desain Baru Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2005.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory*. Fourth Edition. New York: Longman, 2010.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.
- Jurnal**
- Anwar, Dewi Fortuna. "Foreign Policy, Islam, and Democracy in Indonesia". *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010), hal. 37-54.
- Humphryes, Andrew. "Malaysia Post-9/11 Security Strategy: Winning Hearts and Minds or Legitimising the Political Status Quo". *Kajian Malaysia*, Vol. 28, No. 1 (2010), hal. 21-52.
- Nogués, Elisabeth Johansson. "Is the EU's Foreign Policy Identity an Obstacle? The European Union, the Northern Dimension and the Union for Mediterranean". *European Political Economy Review*, No. 9 (2009), hal. 24-48.
- Sukma, Rizal. "Mengelola Paradoks: Identitas, Citra, dan Posisi Internasional Indonesia". *Analisis CSIS*, Vol. 39, No. 4 (2010).
- Tan, Paige Johnson. "Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia's Worldview and Foreign Policy". *Asian Perspective*, Vol. 31, No. 3 (2007), hal. 147-181.
- Thaib, Fachry. "Implikasi Gejolak Politik Timur Tengah terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Diplomasi*, Vol. 3, No. 2 (2011), hal. 35-42.

Wendt, Alexander. "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics". *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (1992), hal. 391-425.

Dokumen Lain

International Monetary Fund. *Direction of Trade Statistics Yearbook 2006*. Washington DC: International Monetary Fund, 2006.

Lee, Mathew. "Clinton: Indonesia Can be Democratic Role Model". *The Jakarta Post* (24 Juli 2011).

